

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban amanah atau mandat yang melekat pada suatu Pemerintahan. Salah satu perwujudan Good Governance adalah pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah, telah diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam perwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan dokumen LKj IP dan Perjanjian Kinerja (PK) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah,

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.239/IX/6/8/2003 yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKj IP.

Evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah sangat penting untuk melihat apakah hasil kerja yang telah direncanakan tersebut sesuai dengan perencanaan kerja, untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang penulis mengangkat judul **“Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang”**.

Dengan diangkatnya judul ini diharapkan instansi yang bersangkutan dapat membantu atau bekerjasama dengan penulis dalam pembuatan tugas akhir.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang, yaitu:

1. Bagaimana Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya dalam Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang?

1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa/mahasisiwi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

Adapun tujuan yang dicapai dalam kuliah kerja praktek/magang ini adalah:

1. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
2. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang didapatkan dari ilmu perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara Dan Daerah Diploma III Universitas Andalas.
3. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja nyata pada masa sekarang ini.
4. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam bentuk yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
5. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh ditempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat magang bagi universitas adalah :

1. Menciptakan SDM dengan keahlian profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja
2. Membina dan meningkatkan hubungan antar dunia pendidikan atau perguruan tinggi dengan dunia kerja
3. Dapat mengetahui dan memahami permasalahan yang sering terjadi di dunia kerja dan mampu memecahkannya.
4. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam bentuk yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin yang berbeda.
5. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh di tempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.

Manfaat magang bagi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang:

1. Secara langsung mendukung serta memberikan fasilitas bagi program pemerintah untuk menciptakan SDM berkualitas baik.
2. Membina hubungan baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Magang merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pada instansi pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat. Adanya manfaat yang diperoleh secara garis besar bagi penulis setelah kegiatan magang sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui tugas, wewenang dan tanggungjawab dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang
2. Dapat mengetahui proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang
3. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja serta mengaplikasikan teori yang didapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.
4. Melengkapi salah satu persyaratan sebelum menyelesaikan studi.

1.5 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Magang adalah syarat utama untuk melalui proses pendidikan program Diploma III Universitas Andalas. Mahasiswa tingkat akhir diwajibkan untuk melakukan magang di suatu perusahaan/instansi sebelum mendapatkan gelarnya. Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja, dalam kegiatan magang kita memiliki kesempatan mengaplikasikan semua ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional.

Penulis melakukan kegiatan magang di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Padang Panjang yang beralamatkan di Jln.

Perintis Kemerdekaan No.4 Kota Padang Panjang. Magang berlangsung selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 05 Juni 2017 s/d 04 Agustus 2017.

1.6 Sistematika Tugas Akhir

Penulisan laporan magang ini dibagi dalam lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

BAB I

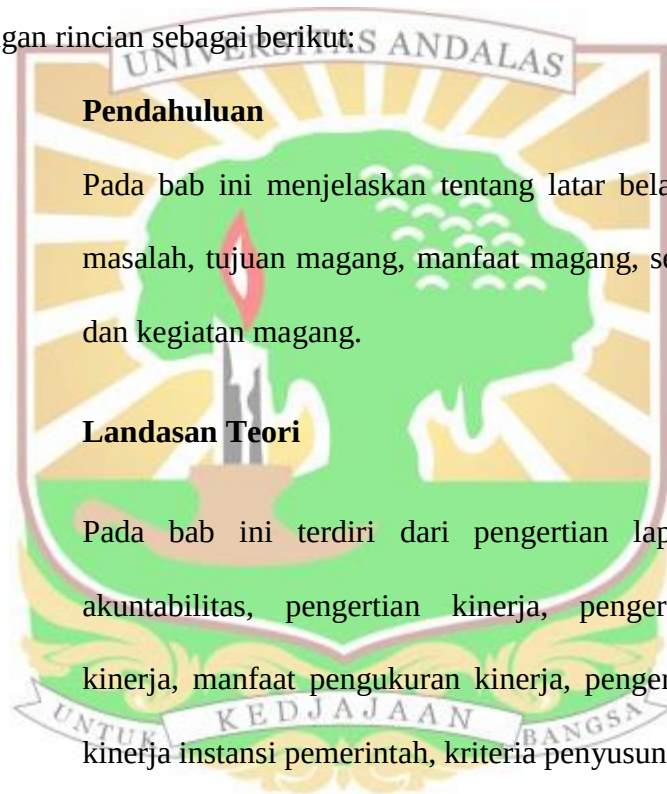
Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta tempat waktu dan kegiatan magang.

BAB II

Landasan Teori

Pada bab ini terdiri dari pengertian laporan, pengertian akuntabilitas, pengertian kinerja, pengertian pengukuran kinerja, manfaat pengukuran kinerja, pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kriteria penyusunan LKj IP, prinsip LKj IP, tujuan LKj IP, manfaat LKj IP, fungsi LKj IP, penanggung jawab penyusunan LKj IP, mekanisme pelaporan, waktu penyampaian LKj IP, pokok pembahasan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dasar hukum pemberlakuan LKj IP.



BAB III

Gambaran Umum

Pada bab ini terdiri dari visi dan misi, tujuan dan sasaran, struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsi unit organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang

BAB IV

Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan LKj IP serta bagaimana upaya penyelesaiannya

BAB V

Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan laporan yang dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.

